

Gerakan Islam Pasca Orde Baru: Kelahiran FPI dan Dampaknya

Rohit Mahatir Manese
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
rohit@iain-manado.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah melacak kelahiran Front Pembela Islam (FPI) serta dampaknya di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kepustakaan untuk membaca, menganalisis dan mensistensikan data-data yang didapat dengan tema penelitian terkait FPI. Artikel ini menemukan bahwa Pasca orde baru, ruang kebebasan semakin terbuka. Di antara ruang yang terbuka itu dimanfaatkan oleh gerakan Islam radikal untuk menampakan diri dan turut mewarnai reformasi Indonesia, salah satu diantaranya adalah Front Pembela Islam (FPI). Selanjutnya dengan realitas demokrasi yang terbuka tadi, lewat musyawarah yang dilakukan Habib Riziew dkk membuat secara organisasi gerakan ini tumbuh. FPI semakin berkembang ketika memiliki hubungan baik dengan Militer dan Polri, FPI sering mendapatkan suplai dana dan impunitas atas hukum. Sejak kelahirannya keberadaan FPI mempunyai implikasi dalam kehidupan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia seperti: Dakwa kebencian, penyerangan dan intoleransi, politisasi Agama dan mendorong lahirnya Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) di Indonesia.

Kata kunci: *Demokrasi, FPI, Ujaran Kebencian, Intoleransi, Preman Berjubah*

Abstract

The purpose of this study is to trace the birth of the Islamic Defenders Front (FPI) and its impact in Indonesia. This article uses the library method to read, analyze and systematize the data obtained with the theme of FPI-related research. This article finds that post-new order, the space of freedom is increasingly open. Among the open spaces that are used by radical Islamic movements to reveal themselves and help color Indonesian reform, one of which is the Islamic Defenders Front (FPI). Furthermore, with the reality of open democracy earlier, through deliberations carried out by Habib Riziew et al, this movement grew organizationally. FPI is growing when it has good relations with the military and police, FPI often get funding supply and impunity over the law since its birth the existence of FPI has implications in national and religious life in Indonesia such as: accusations of hatred, assault and intolerance, religious politicization and encourage the birth of Sharia regional regulations (Perda Syariah) in Indonesia..

Keywords: *Democracy, FPI, Hate Speech, Intolerance, Thugs In Robes*

Pendahuluan

Radikalisme merupakan pandangan ekstrem yang berpotensi mendorong timbulnya kekerasan fisik maupun non fisik. Radikalisme yang berhubungan dengan Agama adalah tindakan atas nama agama yang menghendaki perubahan secara drastis asalkan target-targetnya bisa tercapai. Fenomena radikalisme agama telah menjamur di Indonesia dari aksi virgilante, intoleransi hingga dalam bentuk aksi teror. Islam adalah agama yang sering dikaitkan dengan aksi-aksi radikalisme, baik di dunia maupun pada ranah global.

Terdapat dua bentuk radikalisme jika dipadankan dengan Islam, yakni: Pertama; kelompok komunitas keagamaan yang menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan agama; Kedua, kelompok agama yang menginginkan berdirinya negara Islam. Perkembangan radikalisme di Indonesia menurut Greg Barton terjadi pada dekade 1950, ini dibuktikan dengan munculnya gerakan Darul Islam. Pada 1962 gerakan radikal Darul Islam dapat dihentikan oleh pemerintah Indonesia, namun tidak hilang sepenuhnya karena terlanjur mendapat simpati dan dukungan dari sebagian kalangan umat Islam. (Zulfadly, 2017: 173-198)

Sejalan dengan Barton, Bruinesen pun menekankan bahwa “Islam radikal” bisa dilacak pada munculnya Darul Islam di beberapa kota dan partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumii)--mereka memiliki komunikasi dengan gerakan radikal yang ada di Timur Tengah. (Bruinesen, 2022: 117-154) Masyumi membawa gagasan Islam dalam kerangka kenegaraan di parlemen dan berhasil menempati posisi kedua pada Pemilu 1955. Embrio dari gerakan tersebut menyisakan ideologi yang tetap hidup dikalangan kelompok-kelompok Islamis--yang memahami pemahaman keagamaan radikal sebagai jalan hidup Islam, sehingga tetaap berlanjut hingga 1970-an dengan kemunculan kemunculan Komando Jihad (Komji). Komji melakukan aksi radikalnya dengan meledakkan tempat Ibadah. Pada tahun 1977, muncul Front Pembebasan Muslim Indonesia dengan melakukan tindakan yang sama dengan pola perjuangan seperti Revolusi Islam tahun 1978. (Mubarak, 2008:7)

Era reformasi yang ditandai oleh keruntuhan orde baru pada 1998 Indonesia mulai membenah diri dengan melakukan demokratisasi sistem politik. Kondisi ini kemudian membuat alam politik Indonesia kian terbuka. Keterbukaan membuat berbagai varian gerakan Islam muncul ke permukaan. Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan gerakan Islam radikal ini mulai meramaikan ruang publik Indonesia. Gerakan yang mereka lakukan menggunakan cara-cara intoleran dan koersif. Varian-varian gerakan tersebut di wakili oleh beberapa komunitas Islam,

seperti: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI) dll. Dari varian-varian tersebut FPI adalah salah satu gerakan yang paling frontal Gerakannya kerap diwujudkan secara vigilante, pada saat yang sama mengkritik demokrasi sebagai thagut. FPI pernah mendesak Gubernur Jakarta, Sutiyoso untuk memperketat waktu buka hiburan malam saat ramadhan, menekan pemerintah untuk tidak melaksanakan acara kebudayaan dan seni-musik—seperti penolakan konser Lady Gaga di Jakarta. FPI menjadi momok dan mengancam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Padahal FPI lahir dari rahim demokrasi. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kelahiran Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia serta efek yang dihasilkan dari visi gerakannya.

Memang sejak 30 Desember 2020, FPI telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu organisasi resmi yang terdaftar dalam hukum di Indonesia. Atribut da segala kegiatan mereka dibubarkan dan dihentikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, Kepala Poliri Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tetapi membaca akar kemunculannya di Indonesia masih relevan, karena pelarangan gerakan FPI, tidak bisa mengaburkan fakta sejarah kemunculan FPI dari Rahim demokrasi. Kemudian pembubaran FPI pula tidak bisa menghilangkan sejarah peran FPI dalam mempertunjukan corak keagamaan yang intoleransi, radikal, vigilant yang penuh dengan simbol-simbol Islam.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan makna yang mendalam dibalik ucapan, tindakan, realitas yang kasat mata. (Helaludin dan Wijaya. 2019, 16). Sedangkan jenis yang dipakai dalam metode ini adalah metode kajian kepustakaan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah literature atau dokumen-dokumen yang membahas topik yang relevan dengan tema kajian. Untuk memperoleh data penulis melakukan langkah-langkah riset, seperti: Pertama, melakukan seleksi terhadap topik penelitian; Kedua, menyempitkan pada topik yang relevan; Ketiga, membaca dan melakukan review terhadap kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, melakukan interpretasi data; Kelima mensintesis data yang untuk dicatat dalam penelitian ini, sebagai hasil dari penelitian. Sumber yang menjadi rujukan adalah buku, artikel jurnal, artikel di

media online maupun media cetak yang membahas tentang FPI dan berbagai macam topic yang relevan

Gerakan Radikal dan Jalan Terjal Demokrasi Indonesia

Melacak kelahirandari FPI tidak bisa lepas dari perbincangan demokrasi, karena sistem politik negara yang dianggap paling baik diseluruh dunia ini memiliki ambiguitasnya sendiri dengan memunculkan penantang-penantangnya. Demokrasi membuat ruang-ruang partisipatif bagi kelompok tertentu untuk mengejar dan mengartikulasikan kepentingannya masing-masing.. (Beetham, 2004: 61-75) Demokrasi dengan segala konsekuensinya memberikan keleluasaan bagi kebebasan berpendapat, berserikat maupun berkumpul. Konsekuensi ini memberikan tempat untuk kelompok tertentu, termasuk kelompok agama yang intoleran. Kelompok-kelompok ini kemudian eksis dan saling merebutkan posisinya di ruang publik. Bagi Masdar Hilmy di negeri ini, demokrasi hampir memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk melakukan apapun makanyan jauh lebih terbuka dibanding demokrasi yang ada di negara-negara lain apalagi negara tetangga Malaysia. (Hilmy, 2015: 407-425) Dengan undang-undang keamanan, pemerintah Malaysia dapat menindaki siapa-pun yang dicurigai membahayakan kehidupan publik. Regulasinya membuat otoritas di Malaysia bisa memenjarakan siapapun tanpa harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu.

Secara konstitusional ruang yang bebas dan terbuka dijamin oleh hukum. Warga negara memiliki hak untuk bebas berpendapat, berekspresi, berserikat, berkumpul, berpendapat dan beragama. Hak-hak tersebut merupakan prinsip dari demokrasi Indonesia. Prinsip ini diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 tentang HAM, dan diperkuat oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 mengafirmasi bahwa setiap individu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meski dalam undang-undang tersebut telah dijamin berbagai kebebasan tadi, terjadi juga tumpang tindih antar undang-undang keagamaan di Indonesia. Aturan yang berseberangan dengan kebebasan di atas adalah aturan penodaan agama yang terdapat pada UU PNPS 1965. Kehadiran UU ini sering menjadi landasan pembatasan kebebasan bagi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Bukan hanya itu UU itu kemudian membatasi hak penganut Agama leluhur. Aturan yang satu melindungi kebebasan beragama, sementara pada saat yang sama aturan yang lain mengeksklusi kelompok minoritas agama. Padahal mereka yang memeluk agama apapun adalah warga negara Indonesia yang dijamin oleh kehidupan

demokrasi di Indonesia dan tercatat dalam konstitusi. Eksklusi dan pembatasan yang dilakukan oleh negara kemudian disambut dengan tindakan intoleran dari kelompok Islam yang ekstrem dan radikal. Dari sinilah demokrasi melahirkan jalan terjalnya yakni kehidupan publik di kuasai oleh mereka yang mayoritas. Mayoritas memiliki relasi kuasa atas minoritas.

Tetapi terdapat pula visi politik yang pragmatis dari FPI, meski diuntungkan dengan demokratisasi, mereka juga sistem demokrasi karena dipandang sistem yang berasal dari Barat, Apapun yang dari Barat dipahami bukan bagian dari Islam, produk kafir. Demokrasi tidak sejalan dengan nafas Agama. Demokrasi dikritik karena permisif dengan kehidupan yang gamang, seperti: Tradisi seks bebas, perjudian, aborsi dan lain-lain, yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Merespon demokratisasi di atas ada dua reaksi yang timbul dari kelompok Islam yakni kelompok yang sering terlibat konflik dan melakukan aksi teror. Kelompok selanjutnya adalah peledakan bom serta kelompok yang melakukan kampanye melawan prostitusi, pornografi, minuman keras, obat-obat terlarang dan perjudian. (Hiariej, 2010: 131-168) Kelompok kedua juga sering melakukan aksi diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti melakukan penyerangan, menyegel masjid dan mempersekusi pemukiman. Kelompok pertama mereka sering terlibat dalam konflik komunal seperti yang terjadi Maluku dan Sulawesi Tengah, mereka melakukan tindakan kekerasan mengatasnamakan muslim, serupa dengan itu kecenderungan kelompok pertama sering melakukan peledakan bom persis yang terjadi di Kediaman duta besar Filipina di Jakarta pada tahun 2000, Gereja HKBP dan Gereja Santa Ana pada bulan Juli 2001, Bom Bali satu dan Bom Bali dua; Serta kasus-kasus pengeboman lainnya di Indonesia.

Kelompok kedua juga sering melakukan aksi diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti melakukan penyerangan, menyegel masjid dan mempersekusi pemukiman. Dari kecenderungan yang dipetakan di atas, latar yang bisa diambil adalah era reformasi menciptakan lawannya sendiri yakni selain kelompok radikal yang ingin mengganti tatanan dan sistem negara, muncul juga kelompok preman berubah—yang memiliki pandangan dan tindakan sendiri dengan alasan menjaga kemurnian Islam di Indonesia, melakukan sweeping atas pergaulan bebas, pornografi dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan Islam arus utama di Indonesia. Inilah peran yang selama ini dimainkan oleh FPI. Muncul karena kebebasan tetapi bergerak mengganggu dan membatasi kebebasan kelompok lain. Demokrasi menciptakan ambiguitasnya sendiri yakni menghidupkan hak kebebasan kelompok atau individu,

tapi di sisi lain kebebasan justru menciptakan kekerasan dan diskriminasi di alam demokrasi Indonesia.

Kelahiran FPI: Pertemuan Tokoh dan Pendanaan Aparat Negara

Pada 17 Agustus tahun 1998, tepatnya 53 tahun usia kemerdekaan Indonesia sejumlah tokoh Islam haba'ib, ustadz dan ulama, yang hampir semuanya perwakilan dari Jakarta berkumpul di pesantren Al-Umm, Ciputat, Jakarta. Pertemuan itu dilaksanakan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. (Jahroni, 2004: 197-256) Pembahasan yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia. Terdapat dua persoalan yang dialami oleh Indonesia saat itu, persoalan interen umat Islam dan kondisi bangsa Indonesia yang menghadapi sikap orde baru yang represif dan anti kritik. Yang hadir dalam pertemuan ini: K.H Cecep Bustomi, Habib Idrus Jamalahe, K.H Damanhuri, Habib Muhammad Rizieq Shihab. K.H Misbahul Anam sebagai tuan rumah dari musyawarah ini. Hasil pertemuan itu bahwa umat Islam harus menjadi aktor untuk menjawab persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, inilah kemudian yang menjadi embrio kelahiran FPI. Membentuk organisasi adalah langkah strategis untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi interen Islam dan bangsa Indonesia. FPI memiliki kantor pusat di Jakarta. Mereka memiliki doktrin amar makruf nahi munkar doktrin tersebut menjadi landasan dari gerakan mereka. Gerakan untuk mencegah kemaksiatan dan anti terhadap bid'ah.

Tokoh utama FPI, Habib Riziq memiliki keturunan Hadrami yakni Arab Yaman. Hadrami Habib Riziq adalah Hadrami yang puritan. Riziq masih memiliki ikatan keluarga dengan para pendiri lainnya yang tergabung dalam Hadrami Batavia atau Jakarta, selain itu ada juga aktor-aktor FPI yang merupakan keturunan Arab, Imam besar FPI, Habib Muchsin Bin Zaid Al-Athos. Anggota penting lainnya termasuk Ali bin Abdurahman Assegaf, Ahmad bin Novel bin Jindan, Salim al-Atas, dan Abdur Rasyid bin Abdullah Syafi, dari kekeluargaan inilah terbentuknya pertemuan-pertemuan mereka hingga menghasilkan satu kesepakatan bahwa harus ada organisasi terbaik untuk menegosiasikan dan mempengaruhi publik Indonesia.

Rizieq memiliki agenda utama untuk melaksanakan kebenaran dan mencegah korupsi, sehingga agenda ini membawanya pada persoalan krisis moral, krisis iman, dekadensi, dan korupsi yang sering digaungkan dalam ceramah-ceramahnya. (Jahroni, 2004: 197-256) Ceramah ini mendulang perhatian publik, apalagi muslim perkotaan yang merasa terpinggirkan. Sehingga banyak dari Muslim yang memilih untuk bergabung dengan FPI dan mempengaruhi politik Indonesia. FPI tidak

memiliki kursi secara elektoral, dan tidak mempunyai kursi diparlemen, tetapi FPI menjadi kekuatan politik. Politik tidak selalu berlaku secara formal tapi politik menjadi medan perjuangan menguasai imajinasi orang. FPI memiliki popularitas yang cukup luas, pada tahun 2001, FPI menentang pencalonan Presiden Megawati, karena bagi mereka dalam Islam tidak ada pemimpin perempuan. Hingga hari ini FPI anggotanya sekitar 10.000 hingga 20.000 yang sebagian besar berada di Jakarta, selain itu, cabang-cabang kecil berfungsi di wilayah kepulauan Indonesia di mana konflik agama-agama terjadi, atau masih terjadi: Aceh, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Sulu, di Filipina selatan. (Facal, 2019: 1-22) Selain mempengaruhi umat muslim pada umumnya FPI mempunyai hubungan baik dengan elit negara dan militer di Indonesia.

Awal berdirinya FPI di danai oleh Mochsin Mochdar yang tak lain merupakan ipar dari Baharudin Jusuf Habibie. Cara untuk menyuplai dana dilakukan melalui Yayasan Al-kaufar. Beberapa kerabat Suharto juga memainkan peran untuk mendanai FPI, termasuk melalui yayasan amal militer yang bernama Kartika Eka Paksi. Suplai dana dari yayasan amal Militer dilakukan, karena FPI memiliki hubungan baik dengan Angkatan Darat yang memiliki pengaruh politik di Indonesia. Selain menyalurkan dana, tidak menutup kemungkinan memberikan perlindungan militer terhadap gerakan FPI. Petinggi Angkatan Darat yang dekat dengan FPI di antaranya adalah Jenderal Mayor Zacky Anwar Makarim (kepala dinas intelijen tentara pada akhir 1990-an), Letnan Jenderal Suaidi Marasabessy (rekan dekat Wiranto dan kemudian menjadi seorang anggota partai Demokrat yang dikepalai oleh Presiden Yudhoyono); Jenderal Fachrul Razi (1999-2000); Sutiyoso (gubernur Jakarta 1997-2007 dan kepala Intelijen Layanan pada tahun 2015-2016). (Facal, 2019: 1-22)

Dengan Polisi Republik Indonesia (Polri) juga digadang-gadang FPI memiliki hubungan yang cukup baik, karena FPI berguna bagi Polri sebagai “anjing penyerang” maka untuk itu mereka secara reguler menerima pendanaan dari polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN). (Wilson, 2018: 264) Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut mulai mengalami cerai berai karena tindakan FPI yang makin tidak tolerir, sering menekan polisi untuk menjalankan kepentingannya sendiri. FPI berkonfrontasi dengan pemerintah karena menganggap permasalahan yang terjadi seperti dekadensi moral, prostitusi, perjudian dll merupakan kelalaian pemerintah, namun disisi lain FPI memiliki kedekatan dengan aparat negara sehingga meski tindakan mereka sering melanggar hukum, sebelum adanya pembubaran di awal tahun 2021, FPI bisa impunitas terhadap hukum. FPI

memainkan peran, memproduksi ide dan simbol musim agar bisa memukau kelompok konservatif serta benegosiasi dengan aparat negara.

Dampak Keberadaan FPI di Indonesia

Sebagai gerakan muslim, kelahiran FPI memiliki implikasi terhadap ruang publik Indonesia. Implikasi inilah yang menjadi jembatan melihat bahwa FPI bagian dari gerakan Islam yang radikal. Tindakan dan gerakan FPI, yakni: dakwah kebencian, penyerangan (intoleransi) dan melakukan sweeping tempat yang dianggap maksiat. Dalam mempengaruhi publik, Riziq dalam setiap pidatonya ia mengkritik pemerintah yang gagal dalam menghentikan korupsi di Indonesia. Mengajak dalam kebenaran dan mencegah korupsi adalah narasi besar yang dipakai oleh Riziq sebagai spirit Jihadnya. Bahasa politik ini sangat penting untuk memukau publik dan FPI mulai mendapatkan dukungan. Selain dari bahasa politik yang mengecam penguasa, tokoh FPI juga sering menyampaikan pesan-pesan kebencian dalam agenda-agenda dakwahnya.

Pesan kebencian yang sering dikemukakan oleh FPI masuk kategori: Pertama, dehumanisasi dan demonisasi individu atau kelompok; Kedua, membenarkan kekerasan serta melakukan provokasi.(Woodward et.all, 2020: 153-171) Dehumanisasi adalah proses psikologis dan simbolis yang mendefinisikan kelompok individu atau kelompok bukan sebagai manusia. FPI memiliki target Jihad apa yang disebut sebagai penyimpangan agama dan moral. Ujaran kebencian yang disampaikan oleh FPI sering menyasar kelompok minoritas. Sekretaris Jenderal FPI, Sobri Lubis pernah berceramah dengan muatan yang provokatif dan bermakna pesan kebencian. Ia berteriak lantang dan mengatakan “Bunuh! Bunuh! Bunuh! Bunuh Ahmadiyah. (George, 2017: 167) FPI menargetkan Ahmadiyah sebagai kelompok yang dibencinya. Pesan-pesan yang disampaikan ini sangat provokatif. Mengingat FPI memiliki daya tarik sendiri, ceramah kebencian bisa memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pelanggaran kebebasan beragama kelompok minoritas. Pada 8-10 Juli 2005 di Kampus Mubarak Bogor, Ahmadiyah melaksanakan pertemuan tahunan, Jalsa Salana, namun di sela-sela kegiatan, FPI dan Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) melakukan aksi untuk menghentikan dan membubarkan kegiatan pertemuan tahunan. (Assyaukanie, 2009: 1-21) FPI menggerakkan 3.000 massa untuk melakukan desakan terhadap Ahmadiyah agar mereka menghentikan aktifitas kegiatannya. Ahmadiyah sering menjadi target FPI untuk meluncurkan agenda-agenda koersifnya.

Selain itu, FPI juga menyerang kelompok yang dianggap memiliki haluan pemikiran liberal dan sekuler. Penyerangan ini juga dilakukan karena didorong oleh fatwa MUI 2005 tentang haramnya SIPILIS (Sekularisme, Liberalisme dan sekularisme). Perbedaan pemikiran berujung pada tindakan intoleransi, pada 1 Juni 2008 bertepatan dengan peringatan 63 tahun Pancasila terjadi serangan sangat tragis yang dikenal dengan Tragedi Monas”. Saat itu Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) melakukan demonstrasi damai di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pusat. AKKBB terdiri dari perwakilan 70 organisasi di Indonesia, di antaranya, seperti: Jaringan Islam Liberal (JIL), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Dewan Uskup Indonesia (Kantor Wali Gereja) Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan banyak kelompok agama dan antar-gama lainnya. (Crouch, 2009: 1-20) Aksi damai AKKBB bertujuan untuk menyuarakan penghargaan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan; mendukung Pancasila, mendukung pluralisme di Indonesia dan termasuk pula menyuarakan hak kebebasan beragama dari Ahmadiyah. Saat demonstrasi berlangsung kelompok Islam radikal sudah melakukan persiapan, para anggota mereka tampak membawa pentungan dan bambu runcing. Artinya mereka sudah siap untuk menyerang dan menjadi aktor untuk memincu bentrok. FPI akhirnya menyerang massa AKKBB. Akhirnya 70 orang mengalami cedera akibat dari tragedi ini. Anehnya anggota FPI yang telah menyerang dan melakukan aksi kekerasan sebagian lolos dari hukum. adapula yang mendapat hukuman tapi tidak setimpal dengan aksi yang dilakukan mereka. Impunitas terhadap hukuman ini juga tampak di Bekasi. PN Bekasi memvonis mantan ketua FPI Bekasi Murhali Barda 5 Bulan 15 hari penjara dengan dakwaan terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap jemaat HKBP Ciketing pada September 2010. (Djafar, 2018: 151) Padahal putusan-putusan seperti ini tidak sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa FPI memiliki kedekatan dengan negara. Negara di belakang layar menjadi penjamin tindakan radikal dan intoleransi mereka.

Selanjutnya, FPI sering melakukan operasi terhadap tempat-tempat hiburan malam dengan alasan bahwa ini tidak sejalan dengan doktrin Islam amar makruf nahi munkar sebagai landasan pemikirannya. Narasi yang sering dipakai saat sweeping adalah “pemberantasan kemaksiatan”, padahal seringkali mereka tidak benar-benar bersandar pada konsep amar makruf nahi munkar tapi hanya kepentingan politik saja semata. Fakta menunjukkan FPI dan pengusaha hiburan, seringpula melakukan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan. (Syaefudin, 2014: 259-276) Dari sini dapat dilihat bahwa penggunaan simbol, bahasa dan platform agama hanya

dipolitisasi untuk mendulang keuntungan. Agama hanya sebagai alat legitimasi. Cara-cara FPI ini banyak dari kalangan Indonesia menganggapnya sebagai manifestasi terbaru dari premanisme politik. (Wilson, 2014: 1-8) FPI menjadi preman berjubah agama, menggunakan agama untuk meraih kepentingan mereka. Dalam beberapa fakta menyatakan FPI juga berperan besar dalam mendorong Peraturan Syariah (Perda Syariah) yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Bagi mereka penerapan Peraturan Daerah Syariah adalah hukum Tuhan yang bisa berlaku di Indonesia, untuk menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing.

Simpulan

Berbagai macam gerakan radikal lahir dari rahim dari demokrasi. Ada ambiguitas terhadap demokrasi, ruang kebebasan yang dihormati dan dijamin. Tetapi menjadi pintu masuk juga bagi kelompok radikal dan intoleran seperti FPI. FPI didirikan oleh ikatan keluarga yang kuat. Pertemuan pada 1 Juni tahun 1998 menjadi embrio dari kelahiran FPI. Sejak kelahirannya FPI tidak berpolitik secara formalistik tidak mempunyai kursi di parlemen. Tetapi FPI memiliki kedekatan dengan Militer dan Polri, sehingga membuat mereka memiliki posisi politik yang sangat kuat dalam menjalankan agenda-agendanya. Tindakan politik FPI membuat mereka menjadi karismatik ini dibuktikan dengan ekspansi FPI bukan hanya ada di Jakarta namun tersebar luas di berbagai daerah Indonesia. Dampak dari kemunculan FPI di Indonesia turut mewarnai konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, dua agenda yang berhubungan dengan konflik ini adalah: Dakwah-dakwah kebencian yang disampaikan pada acara keagamaan, targetnya adalah kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Agenda selanjutnya melakukan aksi demonstrasi terhadap Ahmadiyah dan lembaga yang mendukung kebebasan beragama di Indonesia. Dalam doktrin amar makruf nahi munkar-nya FPI sering memakainya sebagai landasan untuk pembongkaran tempat hiburan malam, tempat prostitusi, hingga warung makan yang buka pada bulan Ramadhan. Alih-alih untuk menjalankan perintah agama, justru tindakan mereka hanya mempolitisasi agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus & M.F. Nurhuda Y. 2008. *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil*, Jakarta: Kompas.
- Assyaukanie, Luthfie, 'Fatwa and violence in Indonesia', *Journal of Religion and Society* 11, 2009 1–21. <https://doi.org/10.1558/arsr.v21i2.145>
- Beetham, David *The Quality of Democracy: Freedom as the Foundation*, *Journal of*

-
- Democracy, Vol. 15, No. 4 october 2004. <https://muse.jhu.edu/article/173996/summary>.
- Bruinesen, Van Martin, Genealogies of Islamic Radicalism in Post Soeharto Indonesia. *South East Asia Research*, Vol. 10. 2002 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/000000002101297035>.
- Crouch, Melissa, Indonesia, Militant Islam and Ahmadiyah: Origins and Implications. *Melbourne: ARC Federation Fellowship, Centre for Islamic Law and Society*, Melbourne Law School, University of Melbourne.2009.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1551645.
- DJafar, Alamsyah, 2018. *Intoleransi Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta,Elex Media Komputindo.
- Facal, Gabriel Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia, *TRaNS: Trans –Regional and – National Studies of Southeast Asia* page 1 of 22, 7cdoi:10.1017/trn.2018.15 2019 <https://www.cambridge.org/core/journals/trans-trans-regional-and-national-studies-of-southeast-asia/article/islamic-defenders-front-militia-front-pembela-islam-and-its-impact-on-growing-religious-intolerance-in-indonesia/04956697C4BE66115898875DD6494B41>
- George, Cherian 2017. *Pelintiran Kebencian Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, Jakarta; PUSAD.
- Helaluddin dan Hengky Wijaya, 2019. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, Makassar; Sekolah Tinggi Theologia Jaffrey.
- Hiariej, Eric Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 2, November 2010 <https://dev.jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10934>
- Hilmy, Masdar Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru, *Jurnal MIQOT* Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 <http://jurnalmiqotjs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/33>.
- Mubarak, M. Zaki, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta :LP3ES, 2008.
- Syaefudin, Machfud Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI), *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 34, No.2, Juli – Desember. 2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/267895791.pdf>.
- Syaefudin, Machfud Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI), *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 34, No.2, Juli – Desember. 2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/267895791.pdf>.

HISTORIA ISLAMICA
Journal of Islamic History And Civilization

<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/index>
(E-ISSN: 2988-361X) Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2023

Zulfadli, Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Akademika*,
Vol. 22, No.1, Januari 2017.

<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/570>